

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HASIL PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM TERHADAP STUDI KELAYAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pernanda Dirgahayu T.

1287042

Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Diantaranya adalah bahan galian tambang. Pemerintah berusaha mengakomodir perusahaan tambang di Indonesia demi kemakmuran rakyat. Bentuk peran pemerintah adalah dengan mengeluarkan sekumpulan perizinan sebagai bekal dalam menjalankan usaha pertambangan, termasuk diantaranya adalah studi kelayakan yang juga berperan penting untuk pemerintah menilai layak atau tidaknya. Namun, masalah yang terjadi adalah adanya studi kelayakan yang belum layak untuk disetujui, sehingga kegiatan pertambangan menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Dari masalah tersebut, diperlukan pemeriksaan hukum (*due diligence*) oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya kesalahan yang membawa kerugian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait dengan studi kelayakan dalam usaha pertambangan beserta perizinannya, ditambah dengan referensi buku mengenai pemeriksaan hukum (*due diligence*).

Metode pemeriksaan hukum (*due diligence*) dalam usaha pertambangan berbentuk sebagai studi kelayakan. Dalam membuat studi kelayakan seharusnya tidak dikerjakan dengan asal-asalan karena studi kelayakan akan berpengaruh terhadap kegiatan pertambangan, jika terjadi kesalahan maka akan menimbulkan kerugian, sehingga perlu untuk dipertanggungjawabkan demi kepentingan luas masyarakat Indonesia. Perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah akan dicabut sementara atau bahkan permanen karena dampak merugikan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, banyaknya kerugian yang dirasakan adalah kerugian terhadap lingkungan yang berupa pencemaran.

Kata kunci : Studi Kelayakan, Pemeriksaan Hukum, Izin Pertambangan

Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF ACCOUNTABILITY DUE DILIGENCE TO FEASIBILITY STUDY RELATED TO MINING ISSUING PERMITS BASED BY LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4 OF 2009 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING

Pernanda Dirgahayu T.

1287042

Indonesia is a country with a very rich natural resources. Among them are mineral mines. The government has been trying to accommodate the exploitation of mines in Indonesia for the sake of the prosperity of the people. The role of government is to issue a set of licensing as a provision in mining operations, including the feasibility study that also important to assess whether or not the government give that permit. However, a problem that occurs in the feasibility study is that feasibility study isn't yet eligible to be approved, so mining activities causing harm to the public. Of these problems, it needs legal verification (due diligence) by the government to minimize the errors that bring harm.

The method used in this research is to verified the legislation and other regulations related to the feasibility study into the mining business as well as licensing, and also with references books on law verification (due diligence).

The methods of the verification (due diligence) in the mining business as a form of feasibility studies. In feasibility study should not be done carelessly because the feasibility study will affect mining activities, if an error occurs it will cause losses, so it needs to be accounted for in the interest of the public area of Indonesia. Licensing that have been issued by the government will be revoked temporarily or even permanently due to the adverse impact caused by mining activities, many perceived loss is a loss to the environment in the form of pollution.

Keyword : Feasibility Study, Due Diligence, Mining Permit

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iii
PERSETUJUAN REVISI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN MENGENAI PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	21
A. Definisi Pemeriksaan dari Segi Hukum dalam Usaha Pertambangan	21
B. Sejarah Pertambangan di Indonesia	23

C. Pentingnya Usaha di Sektor Pertambangan	27
D. Ruang Lingkup Hukum Pertambangan	30
E. Proses Pemeriksaan dari Segi Hukum dalam Usaha Pertambangan	33
F. Pertanggungjawaban Terhadap Pemeriksaan Segi Hukum	37
BAB III PENERBITAN IZIN DALAM PENGUSAHAAN	
PERTAMBANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN STUDI	
KELAYAKAN	46
A. Definisi Izin Usaha Pertambangan	46
B. Ruang Lingkup Perizinan	51
C. Tahap-Tahap Penerbitan Izin Usaha Pertambangan	57
D. Syarat Penerbitan Izin Usaha Pertambangan	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	71
A. Analisa Terhadap Pertanggungjawaban Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum Terhadap Studi Kelayakan.....	71
1. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga atas Pemeriksaan Segi Hukum dalam Studi Kelayakan	71
2. Analisa Aspek Hukum Sebagai Bagian dari Studi Kelayakan.....	87
B. Analisa Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009	99
1. Studi Kelayakan Sebagai Syarat Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.....	99
2. Tahapan Pembuatan Studi Kelayakan Sebagai Syarat Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	100

C. Analisa Terhadap Pemeriksaan dari Segi Hukum Terhadap Studi Kelayakan yang Mempengaruhi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan.....	111
1. Akibat Hukum Apabila Terdapat Kesalahan pada Tahapan Pelaksanaan Studi Kelayakan	111
2. Kewenangan Pemerintah/Pihak ketiga Mengintervensi Hasil Pemeriksaan Segi Hukum Sebagai Bagian dari Studi Kelayakan	112
BAB V PENUTUP	114
A. Simpulan	114
B. Saran	117
Daftar Pustaka.....	120
Curriculum Vitae	123

